

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan dalam periode yang panjang. Sasaran dari globalisasi ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia di bumi dengan saling memenuhi kebutuhan di antara negara melalui kegiatan ekonomi (Marfuah & Hartiyah 2019). Sehingga amat krusial untuk memperkuat kelompok UMKM yang melibatkan banyak elemen karena sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak pekerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang bekerja, mengurangi angka pengangguran, dan pada akhirnya membantu mengatasi masalah kemiskinan. (Muttaqin et al., 2020).

Permasalahan pendapatan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami kendala berupa kurangnya perkembangan usaha disebabkan oleh minimnya dana yang tersedia untuk UMKM. Kekurangan dana ini bisa berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh pelaku usaha UMKM, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan penghasilan dan memajukan usaha yang dimiliki. Modal yang tidak mencukupi tidak dapat mendukung pertumbuhan usaha. Kemudian masi banyaknya para pelaku UMKM belum memenuhi prosedur

persyaratan kredit untuk mengembangkan pendapatannya (Nita Y Adju et al. 2023).

Namun demikian, dalam implementasinya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui program KUR, pada kenyataannya tidak semua UMKM mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti kelayakan usaha, persyaratan administrasi yang kompleks, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi kendala utama dalam proses pengajuan dan pencairan dana KUR.

Salah satu daerah dengan potensi UMKM yang besar adalah Bener Meriah berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 5.018 unit UMKM tersebar diseluruh kecamatan. Berikut rincian distribusi UMKM di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah UMKM di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024

Kode kecamatan	Nama kecamatan	Jumlah data umkm
11.17.07	Timang Gajah	659
11.17.10	Gajah Putih	285
11.17.01	Pintu Rime Gayo	390
11.17.05	Bukit	1391
11.17.06	Wih Pesam	1097
11.17.04	Bandar	616
11.17.08	Bener Kelipah	99
11.17.03	Syiah Utama	67
11.17.09	Mesidah	129

11.17.02	Permata	285
Jumlah		5018

Sumber: Dinas Dan UKM Koprasi Bener Meriah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 mencapai 5.018 unit, tersebar di 10 kecamatan. Kecamatan Bukit merupakan wilayah dengan jumlah UMKM tertinggi yaitu sebanyak 1.391 unit, diikuti oleh Wih Pesam sebanyak 1.097 unit, dan Timang Gajah sebanyak 659 unit. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah UMKM terendah adalah Syiah Utama dan Bener Kelipah, masing-masing dengan 67 dan 99 unit usaha.

Penyebaran UMKM yang cukup merata ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat di Bener Meriah cukup dinamis. Namun demikian, angka tersebut juga mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pemerataan akses pembiayaan, khususnya dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener Meriah, pada tahun 2023 hanya terdapat 20 UMKM penerima KUR dan meningkat menjadi 22 UMKM di tahun 2024. Jumlah tersebut masih jauh di bawah total keseluruhan pelaku UMKM yang ada.

Kesenjangan ini menandakan bahwa akses terhadap pembiayaan formal masih belum optimal. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, membuktikan kelayakan usahanya, atau menghadapi keterbatasan dalam memahami prosedur perbankan. Padahal, pembiayaan melalui KUR sangat penting untuk menunjang perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan lebih dari lima ribu UMKM di Bener Meriah seharusnya menjadi fokus perhatian dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama dalam membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif dan menyederhanakan proses pengajuan KUR, agar UMKM yang potensial dapat berkembang secara maksimal. Dukungan ini diharapkan akan berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilinda & Mahmud, (2020) menemukan fenomena bahwa UMKM perkembangannya cukup baik di Indonesia, namun terdapat satu kendala yang sampai saat ini mereka hadapi, yaitu masalah pemenuhan modal. Para pelaku UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dan begitu pula masyarakat yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Hasil penelitian Gustiana et., al, (2022) mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui pembiayaan kredit usaha rakyat yang dikenal dengan KUR. Hal ini dikarenakan modal merupakan sarana penting dalam menjalankan usaha, sehingga pemerintah turut berkontribusi melalui bantuan KUR. Program kredit usaha rakyat berpengaruh positif terhadap produktivitas UMKM. Setiap tambahan modal dari KUR yang dilakukan oleh pengusaha dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

Kredit Usaha Rakyat adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah. Inisiatif ini terbukti memberikan

dampak yang baik untuk perkembangan sektor tersebut. Dengan memberikan akses pinjaman yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, KUR memiliki kemampuan untuk mendukung UMKM berkembang serta menghadapi masalah pengangguran dan kemiskinan. Program ini menawarkan kredit dengan bunga rendah dan tanpa jaminan bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat. Dengan adanya KUR, diharapkan pelaku usaha dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya, meningkatkan pendapatan (Fitriyani & Fatmayanti, 2023).

Penelitian Siti Turyani Marfuah, (2019), menyatakan bahwa pendanaan dari KUR berdampak positif dan signifikan pada peningkatan pendapatan dalam sektor UMKM. Sama seperti hasil penelitian Nita Y Adju *et., al*, (2023), menyatakan bahwa pengaruh pemberian kredit usaha rakyat berpengaruh positif dan signifikan pada nasabah UMKM BRI Unit Aloe Saboe Kota Gorontalo. Penelitian Fitriyani & Fatmayanti, (2023) Juga mengatakan bahwa Dampak positif dari pinjaman KUR terhadap perkembangan usaha masyarakat sekitar mencakup peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, Pembiayaan KUR juga berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian lokal.

Namun, penelitian Devina & Lusy, (2020) berbeda dengan penelitian sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa pemberi kredit tidak mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM di siduarjo. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku UMKM yang menerima kredit sudah memiliki stabilitas keuangan yang cukup, sehingga kredit tersebut bukan menjadi modal utama dalam usaha mereka.

Meskipun program KUR telah diluncurkan, banyak pertanyaan yang muncul mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara tujuan program dan realitas yang dihadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di simpang balek Benermeriah, khususnya melalui studi kasus di Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener Meriah.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pembiayaan KUR terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu permasalahan kelayakan usaha, kelayakan usaha ini dilakukan sebelum pemberian pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana, dan tujuan dari survey yang dilakukan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Hal tersebut guna untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam. Permasalahan kelayakan usaha tersebut berdampak pada pendapatan UMKM (Karimah Latiefah, 2024).

Faktor Kedua yang dapat mempengaruhi pembiayaan KUR terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu permasalahan persyaratan administrasi, Untuk memperoleh pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), calon debitur wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang akan disampaikan oleh pihak bank, baik secara langsung saat mengunjungi kantor bank maupun melalui informasi yang diperoleh dari internet (Sarah Mutmainah, 2022).

Hasil penelitian Setiawan Ega Kadek, (2024) mengatakan bahwa banyak pihak UMKM yang sebelumnya memanfaatkan program KUR ini dengan optimal.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengetahuan mengenai prosedur pengajuan KUR, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi, dan rendahnya literasi keuangan para pelaku UMKM. Menurut penelitian Aristanto et, (2023) mengatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai solusi dengan bunga rendah dan persyaratan yang seharusnya mudah diakses. Namun, kenyataannya di lapangan, persyaratan administrasi KUR seringkali menjadi hambatan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan proses administrasi perbankan atau yang kurang memiliki literasi keuangan. Kemudahan dalam mengakses KUR akan mendorong UMKM untuk memanfaatkan pembiayaan tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pembiayaan KUR terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu permasalahan kondisi ekonomi, Kondisi ekonomi adalah kondisi calon nasabah untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang calon nasabah memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya (Perwirasari & Ikrardini, 2020). Menurut penelitian Rika Widianita, (2023) mengatakan bahwa Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penting untuk memperhatikan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan prospek usaha calon debitur. Hal ini dikarenakan terdapat jenis-jenis usaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Pada tahap pemeriksaan, calon debitur diminta untuk melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, pihak Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener Meriah akan melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan calon nasabah dengan

menggali informasi yang berkaitan dengan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener meriah terdapat berbagai macam pembiayaan, yaitu salah satunya pembiayaan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang Meskipun tidak memiliki agunan, namun memiliki usaha yang dinilai layak untuk dibiayai oleh bank. Pemerintah memberikan subsidi terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Anisa et al., 2023).

Penyaluran dana kredit usaha rakyat ini dilakukan dengan bantuan perusahaan penjamin yang berfungsi untuk menyalurkan kepada UMKM, contohnya adalah Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener Meriah ini. Bank ini telah mematuhi persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola atau memberikan pembiayaan kredit usaha rakyat demi mendukung permodalan para UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menjadikan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Aceh KCP Simpang Balek Bener Meriah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kelayakan usaha terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di simpang balek bener meriah?
2. Bagaimana pengaruh persyaratan administrasi terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di simpang balek bener meriah?
3. Bagaimana Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di simpang balek bener meriah?
4. Bagaimana pengaruh kelayakan usaha, persyaratan administrasi, kondisi ekonomi terhadap pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di simpang balek bener meriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kelayakan usaha terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Simpang Balek Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui pengaruh persyaratan administrasi terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Simpang Balek Bener Meriah
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Simpang Balek Bener Meriah
4. Untuk mengetahui pengaruh kelayakan usaha, persyaratan administrasi, kondisi ekonomi terhadap pendapatan UMKM di simpang balek

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama dalam konteks Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya dan Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, baik terkait dengan KUR atau program pembiayaan lainnya yang ditujukan untuk usaha mikro kecil menengah.

1.4.2 Secara Praktis

UMKM akan mendapatkan wawasan mengenai kendala-kendala yang sering terjadi dalam proses pengajuan dan penggunaan pembiayaan KUR, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan mengetahui kendala-kendala yang ada, UMKM dapat lebih siap dalam memanfaatkan dana KUR dengan bijak, untuk memperbaiki pengelolaan usaha dan meningkatkan pendapatan mereka.